

Dalam konteks demokrasi, rekrutmen kandidat pejabat publik oleh partai politik pada dasarnya membuka kesempatan yang sama untuk masuk, bersaing (kompetisi), dan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan bagi setiap warga negara. Setelah itu, akan ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi oleh individu yang ingin direkrut sebagai kandidat tersebut. Persyaratan ini diterapkan oleh parpol dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional, sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, ada pula negara yang menerapkan rekrutmen kandidat dengan mekanisme yang cair; tanpa adanya aturan yang ketat.²⁹

Rekrutmen politik merupakan salah satu tugas dan fungsi partai politik sebab rekrutmen berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Namun, sulit dipungkiri bahwa problematika rekrutmen politik yang dihadapi arti tidak sederhana. Sebagian partai tidak memiliki visi perubahan yang jelas, sehingga hanya sibuk berebut rente (*rent seeking*) melalui jabatan publik di legislatif dan eksekutif. Akibatnya, para elite partai abai menyiapkan sistem rekrutmen sebagai instrumen seleksi yang bisa menjamin terpilihnya para penyelenggara negara yang bersih,

²⁹Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016), 26.

akuntabel, dan memiliki pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Seperti dalam momentum menjelang pemilu, partai politik pada akhirnya cenderung terburu-buru menyiapkan calon legislatif. Sehingga yang muncul dan lolos sebagai pasangan calon adalah mereka yang mengandalkan modal finansial yang besar. memanfaatkan populer secara publik namun tidak kompeten, dan bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki pemahaman mengenai persoalan politik dan pemerintahan yang kelak menjadi tanggung jawabnya. Sebagai dampak lanjutannya, kualitas akuntabilitas para wakil rakyat dan pejabat publik, serta juga kualitas kinerja lembaga demokrasi yang dihasilkan pemilu relatif rendah.³⁰

Proses rekrutmen politik di dalam suatu partai pada dasarnya merupakan manifestasi dari dinamika dan demokrasi internal partai yang bersangkutan. Semakin demokratis kehidupan parpol secara internal maka semakin demokratis pula proses rekrutmen itu berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Dinamika internal partai mencerminkan kecenderungan yang sama. Suatu parpol yang memiliki tingkat pertarungan kekuasaan antar faksi yang tinggi cenderung pula mempunyai mekanisme dan sistem rekrutmen yang terbuka dan

³⁰Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuitan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016), 41.

